

## ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat dan dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti rugi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara tanah, dengan fokus pada studi putusan Nomor 111/PDT.G/2022/PN JMB. Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam konteks sengketa tanah sering kali melibatkan kerugian yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan, sehingga pengaturan mengenai ganti rugi menjadi hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dasar hukum yang mendasari pemberian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum serta implementasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 111/PDT.G/2022/PN JMB, pengadilan telah mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan besaran ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan terkait ganti rugi dalam konteks perkara tanah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

Kata Kunci: **Ganti rugi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah**

## **ABSTRACT**

An unlawful act is an act that is contrary to the legal norms prevailing in society and can harm other parties. In the context of Indonesian law, this unlawful act is regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), which states that "Every act that violates the law and causes harm to another person, requires the person who committed the act to provide compensation." This study aims to legally analyze the settlement of compensation for unlawful acts in land lawsuits, focusing on the study of decision Number 111/PDT.G/2022/PN JMB. Unlawful acts that occur in the context of land disputes often involve losses felt by the injured party, so that regulations regarding compensation are important in the dispute resolution process. In this study, the author examines the legal basis underlying the provision of compensation for unlawful acts and the implementation of applicable legal principles in court. The approach used is the normative research method by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and related court decisions. The results of the study show that in decision Number 111/PDT.G/2022/PN JMB, the court has carefully considered the elements of unlawful acts and determined the amount of compensation in accordance with the losses experienced by the plaintiff. This study also reveals the importance of a deep understanding of regulations related to compensation in the context of land cases to ensure justice and legal certainty in resolving land disputes in Indonesia.

**Keywords:** Compensation, unlawful act, land dispute